

III.A.1 DOKUMEN USULAN

Pembangunan Sistem Informasi Desa Cinta Statistik
(SICANTIK)



BPS Kabupaten Kuantan Singingi
2022

A. Identifikasi Masalah

1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), pemerintah desa/kelurahan menjadi penyelenggara kegiatan statistik di wilayahnya masing-masing sehingga peran desa/kelurahan sebagai satuan wilayah terkecil menjadi sangat penting. Hal ini karena desa/kelurahan tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan. Oleh karena itu, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024, diperlukan penguatan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan untuk mengembangkan wilayah guna mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah menjadi instrumen utama dalam memberikan peluang bagi pemerintah desa/kelurahan untuk membangun desa/kelurahan serta meningkatkan kemandirian dan daya saing desa/kelurahan.

Pengumpulan dan pemutakhiran data statistik yang dilakukan di tingkat desa oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah tidak banyak yang diberikan kembali kepada pemerintah desa/kelurahan serta berpotensi menghasilkan data yang tidak konsisten dan indikator pembangunan yang tumpang tindih. Padahal desa/kelurahan seharusnya memiliki data yang lengkap dan akurat sebagai landasan dalam kebijakan pembangunan di wilayahnya. Selain itu, permasalahan lainnya adalah mengenai relatif masih rendahnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di pemerintah desa/kelurahan dalam hal pengelolaan data desa/kelurahan. Hal ini berdampak pada rendahnya komitmen dan literasi pemerintah desa/kelurahan untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dalam kebijakan pembangunan, yang pada gilirannya dapat berdampak pada pengambilan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Terutama di tengah situasi pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia, pemerintah pusat maupun daerah diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat untuk pembangunan desa/kelurahan yang berkesinambungan.

Data statistik yang dikumpulkan di tingkat desa seharusnya dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh pemerintah desa/kelurahan. Selain itu, pengelolaan dan pemanfaatan

data desa/kelurahan juga seharusnya selaras dengan prinsip SDI. Untuk mewujudkannya tidak hanya diperlukan koordinasi dengan penyelenggara kegiatan statistik dan sinkronisasi proses penyelenggaraannya di tingkat desa/kelurahan, tetapi juga diperlukan peningkatan literasi statistik pemerintah desa/kelurahan dalam rangka menjadikan mereka sebagai subjek dalam pengelolaan dan pemanfaatan data di tingkat desa.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai *leading sector* dalam pengembangan statistik memiliki peran penting dalam peningkatan literasi tersebut. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS berkewajiban untuk memberikan pembinaan statistik kepada Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya, termasuk hingga tingkat desa/kelurahan, melalui Sistem Statistik Nasional (SSN) yang berkesinambungan sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam peningkatan literasi statistik guna mendukung pembangunan nasional. Salah satu perwujudan amanat UU tersebut adalah disusunnya suatu kegiatan pembinaan statistik sektoral di tingkat desa/kelurahan secara berkesinambungan dan komprehensif, yaitu Program 100 Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) yang telah ditetapkan sebagai salah satu program percepatan (*quick win*) BPS pada tahun 2021.

Pada tahun 2022, BPS Kabupaten Kuantan Singingi telah memilih 16 desa untuk dibina menjadi desa cinta statistik. Daftar desa yang dibina dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Daftar desa pembinaan desa cinta statistik

No.	Kecamatan	Desa
1.	Kuantan Mudik	Saik
2.	Kuantan Mudik	Kinali
3.	Hulu Kuantan	Lubuk Ambacang
4.	Gunung Toar	Pisang Berebus
5.	Pucuk Rantau	Pangkalan
6.	Singingi	Pasir Emas
7.	Singingi Hilir	Sungai Buluh
8.	Kuantan Tengah	Pulau Aro

No.	Kecamatan	Desa
9.	Sentajo Raya	Geringging Jaya
10.	Benai	Talontam
11.	Kuantan Hilir	Banuaran
12.	Pangean	Pasar Baru Pangean
13.	Logas Tanah Darat	Sidodadi
14.	Kuantan Hilir Seberang	Pelukahan
15.	Cerenti	Kompe Berangin
16.	Inuman	Seberang Pulau Busuk

2. Sistem yang Sedang Berjalan

Sebagian besar desa yang dibina belum memiliki sistem informasi desa. Data kependudukan masih direkam secara manual berupa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang disimpan dalam bundel arsip desa. Aktivitas layanan surat masih dilakukan secara manual yaitu dengan mengedit template surat yang selama ini sudah ada sesuai kebutuhan permintaan layanan. Analisis sistem berjalan dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan pihak desa. Seluruh dokumentasi pertemuan dengan pihak desa beserta instrumen identifikasi permasalahan yang digunakan dapat diakses pada tautan s.id/descan1401.

B. Analisis Masalah

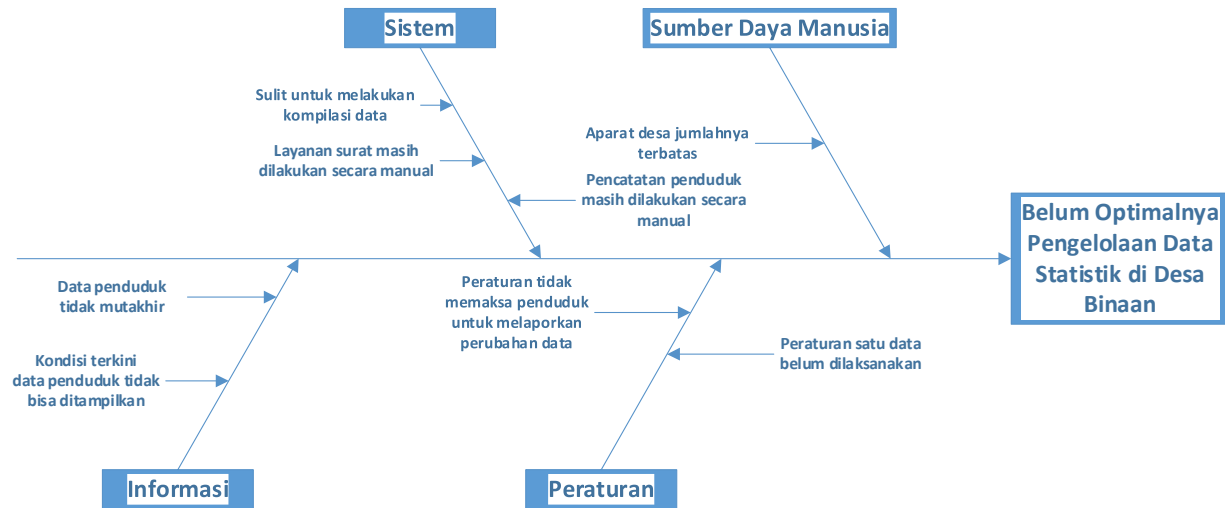
Setelah dilakukan analisis sistem berjalan, dilakukan analisis masalah menggunakan *PIECES framework* berdasarkan sistem berjalan. Tabel berikut menjelaskan permasalahan yang ditemukan :

Tabel 1. *PIECES framework* sistem berjalan

Bagian	Permasalahan
<i>Performance</i>	<ul style="list-style-type: none"> Butuh waktu lama untuk menghasilkan data statistik kependudukan.

Bagian	Permasalahan
	<ul style="list-style-type: none"> – Pelayanan surat membutuhkan waktu yang lama.
<i>Information</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Tidak tersedia data jumlah penduduk secara <i>realtime</i>. – Data penduduk belum akurat, karena pencatatan penduduk masuk, keluar, lahir, dan meninggal belum berjalan dengan baik. – Data penduduk menurut karakteristik tertentu belum tersedia.
<i>Economic</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Pencatatan penduduk masih menggunakan fotocopy KK dan KTP sehingga membutuhkan biaya.
<i>Control</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Sulit memantau penduduk yang belum tercatat. – Sulit mengevaluasi keakuratan data.
<i>Efficiency</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Membutuhkan waktu yang lama dan sumber daya yang banyak untuk menghasilkan data statistik kependudukan. – Warga harus ke kantor desa untuk memperoleh layanan surat. – Pelaporan kependudukan harus dilakukan ke kantor desa.
<i>Service</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Layanan pencatatan penduduk belum maksimal. – Layanan surat belum efektif dan efisien. – Data statisik kependuduk belum tersedia bagi <i>stakeholder</i>.

Dari permasalahan tersebut dilakukan penelusuran akar masalah dengan diagram *fishbone* untuk memodelkan permasalahan yang muncul. Gambar berikut adalah diagram *fishbone* dari permasalahan yang ada tersebut.



Gambar 2. Fishbone diagram analisis masalah pengolaan data statistik desa

C. Usulan Solusi

Ada beberapa alternatif solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Solusi yang diusulkan adalah sebagai berikut :

1. Membangun sistem pengelolaan data statistik desa berbasis desktop

Sistem pengelolaan data statistik desa berbasis desktop dapat mempermudah proses pengelolaan data statistik desa. Namun cara ini masih memiliki beberapa kelemahan, diantaranya:

- Sistem berbasis desktop hanya dapat diakses dikantor dan tidak bisa diakses lewat internet.
- Mebutuhkan spesifikasi PC atau laptop tertentu sesuai dengan kebutuhan minimal aplikasi.
- Tidak bisa memecahkan permasalahan pelayanan surat dari mana saja.
- Kompilasi data statistik yang dihasilkan tidak dapat diakses oleh warga atau *stakeholder* lain secara bebas dari mana saja.

2. Membangun sistem pengelolaan data statistik desa berbasis WEB

Sistem pengelolaan data statistik desa berbasis web dapat mempermudah proses pengelolaan data statistik desa. Sistem ini terdiri dari *backend* dan *frontend*. *Backend* digunakan oleh pihak desa untuk mengelola administrasi kependudukan, berita/artikel, profil desa, dan layanan surat. Sedangkan *frontend* berupa website yang menyediakan

informasi mengenai desa, statistik kependudukan, dan berita/artikel terkini. Pada *frontend* sistem juga terdapat fitur layanan mandiri untuk pelayanan surat administrasi yang dapat diakses tanpa harus perlu datang ke kantor desa.

Dengan sistem ini diharapkan pengelolaan data statistik terutama data administrasi kependudukan dapat berjalan lebih optimal. Data yang saat ini masih berupa fotokopi akan diinput ke dalam sistem. Jika data telah diinput ke dalam sistem, rekapitulasi dan monitoring data kependudukan akan lebih mudah dilakukan karena sistem akan menghasilkan data statistik secara otomatis dari data yang ada. Data ini nantinya juga akan tampil secara otomatis ke halaman *website* desa sehingga memudahkan seluruh pihak untuk mengetahui kondisi data terkini dari desa.

Dari dua solusi yang diusulkan, dipilih alternatif solusi 2, yaitu membangun sistem pengelolaan data statistik desa berbasis web. Solusi ini dipilih karena lebih dapat menjawab permasalahan yang telah dijabarkan pada tahapan analisis masalah.